



TAHUN ANGGARAN
2024



PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA



(KUA)
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	5
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	18
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	22
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	22
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	23
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	25
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024	25
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pendapatan Transfer.....	26
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	28
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	28
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga.....	29
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	31
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	31
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	31

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	32
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	32
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	33
7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	35
BAB VII PENUTUP	36
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dijelaskan lebih lanjut dalam PP Nomor 12 tahun 2019 bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian penyusunan dokumen KUA-PPAS Provinsi Papua



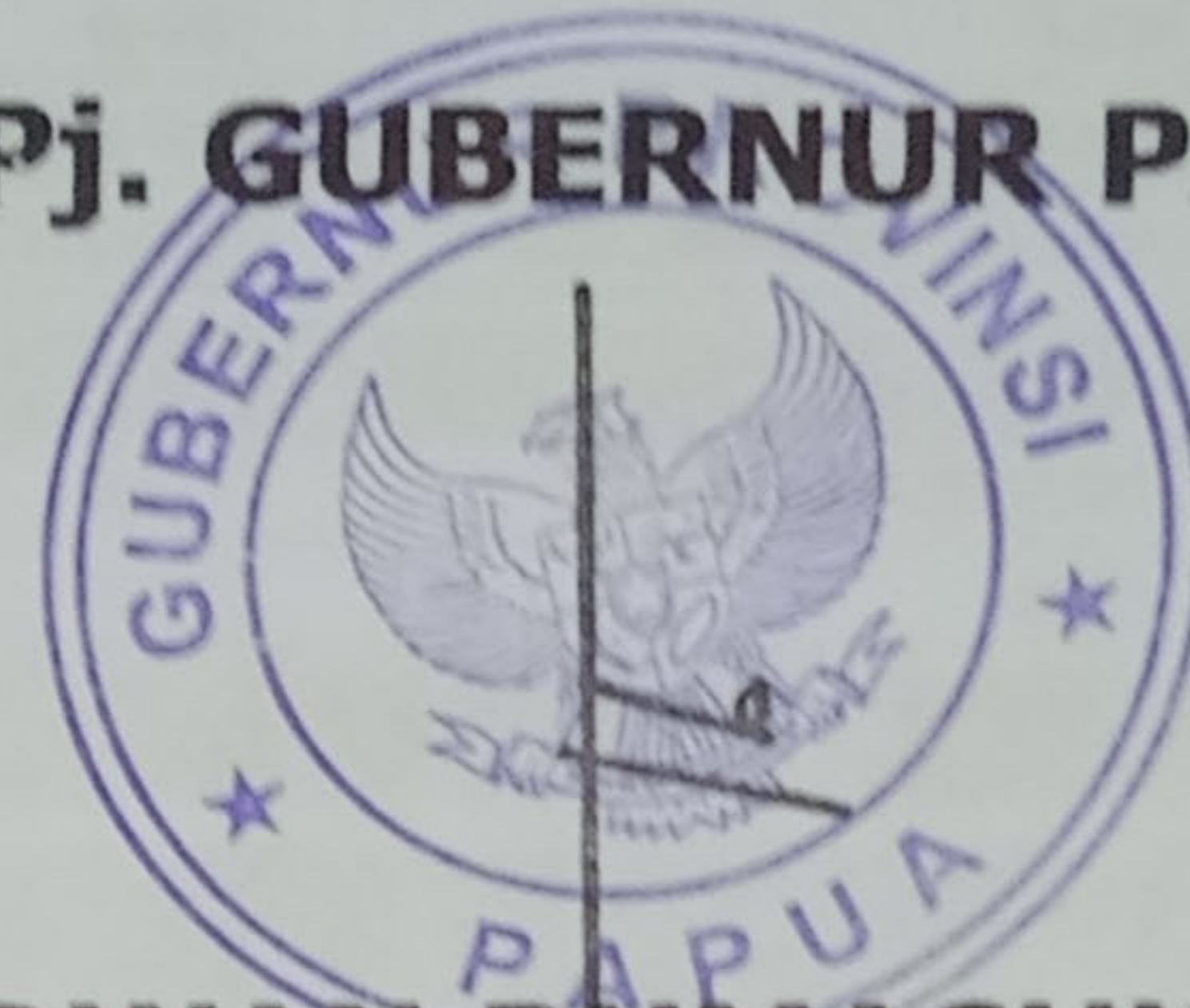
BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD Provinsi Papua ini disusun untuk dibahas dan disepakati bersama sebagai dasar bagi penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024.

Jayapura, 24 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA



Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN., SE., MM



LAMPIRAN : STRUKTUR RANCANGAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023	TAHUN ANGGARAN 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	587.427.517.800,00	565.381.850.000,00	-22.045.667.800,00	-3,75
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	366.773.361.800,00	386.285.664.000,00	19.512.302.200,00	5,32
1.1.2	Retribusi Daerah	14.510.000.000,00	130.021.186.000,00	115.511.186.000,00	796,08
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.518.763.000,00	44.500.000.000,00	2.981.237.000,00	7,18
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.625.393.000,00	4.575.000.000,00	-160.050.393.000,00	-97,22
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.339.071.337.000,00	2.079.568.634.000,00	-259.502.703.000,00	-11,09
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.339.071.337.000,00	2.079.568.634.000,00	-259.502.703.000,00	-11,09
1.2.1.1	Dana Perimbangan				
	a. Dana Transfer Umum	1.067.412.098.000,00	831.894.029.000,00	-235.518.069.000,00	-22,06
	- DBH	243.175.790.000,00	53.847.198.000,00	-189.328.592.000,00	-77,86
	- DAU	824.236.308.000,00	778.046.831.000,00	-46.189.477.000,00	-5,60
	b. Dana Transfer Khusus	220.460.581.000,00	159.056.699.000,00	-61.403.882.000,00	-27,85
	- DAK Fisik	195.899.501.000,00	147.455.984.000,00	-48.443.517.000,00	-24,73
	- DAK Non Fisik	24.561.080.000,00	11.600.715.000,00	-12.960.365.000,00	-52,77
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	470.837.581.000,00	480.248.851.000,00	9.411.270.000,00	2,00
1.2.1.4	Dana Tambahan Infrastruktur	580.361.077.000,00	608.369.055.000,00	28.007.978.000,00	4,83
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.926.498.854.800,00	2.645.950.484.000,00	-280.548.370.800,00	-9,59
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI	2.415.353.019.764,00	2.269.580.903.916,00	-371.221.884.312,00	-15,37
2.1.1	Belanja Pegawai	849.073.619.230,00	738.150.896.974,00	-110.922.722.256,00	-13,06
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.455.606.710.183,00	1.218.237.122.704,00	-237.369.587.479,00	-16,31
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	93.750.778.950,00	312.333.645.488,00	218.582.866.538,00	233,15
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	16.921.911.401,00	859.238.750,00	-16.062.672.651,00	-94,92
2.2	BELANJA MODAL	519.816.636.316,00	406.591.752.084,00	-113.224.884.232,00	-21,78
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.500.000.000,00	62.500.000,00	-3.437.500.000,00	-98,21
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.578.465.813,00	55.639.006.660,00	-61.939.459.153,00	-52,68
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.481.562.452,00	38.113.631.554,00	-64.367.930.898,00	-62,81
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	294.575.408.051,00	311.534.595.000,00	16.959.186.949,00	5,76
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	681.200.000,00	1.242.018.870,00	560.818.870,00	82,33
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	0,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	403.000.000.000,00	19.400.000.000,00	-383.600.000.000,00	-95,19
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	403.000.000.000,00	19.400.000.000,00	-383.600.000.000,00	-95,19
2.4	BELANJA TRANSFER	154.584.348.720,00	220.377.828.000,00	65.793.479.280,00	42,56
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	154.584.348.720,00	220.377.828.000,00	65.793.479.280,00	42,56
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	3.492.754.004.800,00	2.915.950.484.000,00	-576.803.520.800,00	-16,51
	Total Surplus/ (Defisit)	-566.255.150.000,00	-270.000.000.000,00	296.255.150.000,00	-52,32
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	191.255.150.000,00	285.000.000.000,00	93.744.850.000,00	49,02
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	400.000.000.000,00	0,00	-400.000.000.000,00	-100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	591.255.150.000,00	285.000.000.000,00	-306.255.150.000,00	-51,80
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-10.000.000.000,00	-40,00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-10.000.000.000,00	-40,00
	Pembiayaan Netto	566.255.150.000,00	270.000.000.000,00	-296.255.150.000,00	-52,32
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL APBD	3.517.754.004.800,00	2.930.950.484.000,00	-586.803.520.800,00	-16,68